

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR NAGA
TAHUN 2023**



**JL. Raya Batubulan No. 36N, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati,
Gianyar
TELEPON: (0361) 8401000**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Naga pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan ditengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa. PT. BPR Naga memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Bali. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Naga didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh unit kerja terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola. PT. BPR Naga telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi BPR yang terpercaya, tumbuh sehat, dan berorientasi pada layanan dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Naga selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Naga terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Wayan Budi Artana, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit intern, Audit Ekstern dan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan serta rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Melaksanakan Rapat Rutin Direksi yang dituangkan dalam Notulen Rapat. h. Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 			
2.	Nama	:	Ir. I Nyoman Semurah
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Memantau pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. 			

- d. Memantau tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- g. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang.
- h. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dan seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
- i. Mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan/pelatihan.
- j. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM) serta telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi APU PPT PPPSPM. yang merangkap PE kepatuhan.
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Secara umum bank sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara mengoptimalkan upaya penagihan kepada debitur- debitur yang menunggak kewajiban, Melakukan restrukturisasi/ relaxasi kredit- kredit debitur yang terkena dampak pandemi covid-19, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan portofolio kredit baru, lebih selektif dan lebih berhati- hati dalam proses pemberian kredit baru, melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi bisnis, seperti asosiasi property, asosiasi pedagang eceran, komunitas bisnis dan menyalurkan kredit baru di Fintech dengan prudent.
2. Upaya untuk efisiensi disegala lini agar bank tidak membukukan laba negatif sudah dilakukan
3. Rekrutmen tenaga kerja di bagian bisnis guna mendukung penambahan portofolio kredit terus dilakukan
4. Melakukan Stress Test untuk mengitung kekuatan KPMM secara berkala.
5. Direksi sudah menindaklanjuti hasil temuan OJK yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan 2023.
6. Pelampauan BMPK sampai dengan akhir tahun 2023 sudah berhasil diselesaikan.
7. Bank tetap menjaga komponen likuiditas dengan baik sesuai dengan ketentuan.
8. Sebagian besar temuan Audit intern sudah ditindak lanjuti.
9. Penerapan Tata Kelola, APU PPT PPPSPM dan Manajemen Risiko secara berkelanjutan kepada calon nasabah dan nasabah eksis sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Wayan Cenik
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan		

tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, yaitu pemberian rekomendasi/ nasihat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip Kehati-hatian.

b. Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Rencana Bisnis Bank 2024 dan

c. Dewan Komisaris telah mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

e. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern (KAP), dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi oleh direksi.

g. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat 4 kali dalam 1 tahun.

h. Dalam pengambilan keputusan rapat bersifat strategis Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat mencantumkan dissenting opinion.

i. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

j. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

k. Dewan Komisaris telah memantau secara ketat terkait Kredit Relaksasi serta kecukupan permodalan akibat Dampak Covid-19.

l. Dewan Komisaris telah memantau penerapan Manajemen Risiko secara berkala.

m. Dewan Komisaris telah memantau penerapan APU PPT dan PPPSPM.

2.	Nama	:	Fadlyn Yudhana
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, yaitu pemberian rekomendasi/ nasihat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip Kehati-hatian.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Rencana Bisnis Bank 2024 dan</p> <p>c. Dewan Komisaris telah mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).</p> <p>e. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern (KAP), dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi oleh direksi.</p> <p>g. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat 4 kali dalam 1 tahun.</p> <p>h. Dalam pengambilan keputusan rapat bersifat strategis Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat mencantumkan dissenting opinion.</p> <p>i. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>j. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>k. Dewan Komisaris telah memantau secara ketat terkait Kredit Relaksasi serta</p>			

<p>kecukupan permodalan akibat Dampak Covid-19. l. Dewan Komisaris telah memantau penerapan Manajemen Risiko secara berkala. m. Dewan Komisaris telah memantau penerapan APU PPT dan PPPSPM.</p>
<p>Rekomendasi Kepada Direksi :</p> <p>Rekomendasi Kepada Direksi</p> <p>a. Direksi harus memastikan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Direksi harus tetap menjaga Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi wajib Membuat Stress Testing terhadap kekuatan Modal secara berkala serta sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Direksi wajib melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu: penambahan tenaga kerja di bidang pengawasan kredit dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah, serta memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Naga. e. Wajib memastikan pemantauan debitur yang terdampak dampak COVID-19 terkait perkembangan usaha debitur. f. Menindaklanjuti Temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Intern serta Akuntan Publik. g. Melakukan Penyelesaian Kredit Bermasalah secara pendekatan persuasif, bila perlu melalui proses litigasi. h. Memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan dengan baik. i. Memastikan penerapan Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern. j. Memastikan penerapan APU dan PPT berjalan dengan baik.</p> <p>ini masih yang lama (belum update)</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <p>Nihil</p>

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

BPR Naga tidak memiliki komite sesuai dengan modal inti BPR.
--

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak Memiliki Komite sesuai modal inti BPR

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak Memiliki komite sesuai dengan modal inti			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Wayan Budi Artana, SE	Rp0	0%
2.	Ir. I Nyoman Semurah	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

Seluruh Anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR Naga.
--

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Wayan Budi Artana, SE	-	-	0%
2.	Ir. I Nyoman Semurah	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada Perusahaan Lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Wayan Budi Artana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir. I Nyoman Semurah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, komisaris dan pemegang saham pada BPR Naga				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Wayan Budi Artana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir. I Nyoman Semurah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya, komisaris, dan pemegang saham pada BPR Naga.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Wayan Cenik	Rp0	0%
2.	Fadlyn Yudhana	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di BPR Naga.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Wayan Cenik	-	-	0%
2.	Fadlyn Yudhana	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota dewan komisaris BPR Naga tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Wayan Cenik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fadlyn Yudhana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR Naga				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Wayan Cenik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fadlyn Yudhana	Tidak ada	Tidak ada	I Ketut Sudiarsana - Keponakan, I Nyoman Eriawan - Keponakan
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan direksi, anggota komisaris lain serta pemegang saham. Sedangkan untuk komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan direksi maupun anggota komisaris lain namun memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham yaitu keponakan dari para pemegang saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp420.000.000	2	Rp347.400.000
2.	Tunjangan	2	Rp44.730.480	2	Rp34.405.764
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp464.730.480		Rp381.805.764
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Untuk Direksi dan dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa gaji dan tunjangan.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Roda Empat (Mobil) (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Direksi memperoleh fasilitas kendaraan roda 4 (Empat) sesuai dengan keputusan RUPS 2. Direksi dan Dewan Komisaris juga memperoleh fasilitas Asuransi Kesehatan BPJS sesuai dengan keputusan RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. 2) Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksana. 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima selama setahun.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Januari 2023	2	1. Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan Desember 2022. 2. Kredit Bermasalah. 3. Agunan Yang Diambilalih. 4. Tingkat Kesehatan Bank. 5. Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan 6. Isu Kritis 7. Rekomendasi
2.	24 April 2023	2	1. Evaluasi Kinerja Keuangan Periode Bulan Maret 2023 2. Kredit bermasalah 3. Agunan Yang Diambil alih 4. Penerapan Program APU dan PPT 5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan 6. Penerapan Manajemen Risiko 7. Rekomendasi
3.	26 Juli 2023	2	1. Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan Juni 2023 2. Kredit bermasalah 3. Agunan yang diambilalih 4. Tingkat Kesehatan Bank 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tanggal 2023 6. Issue-Issue Kritis 7. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.	16 Oktober 2023	2	1. Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan September 2023 2. Kredit Bermasalah 3. Agunan Yang Diambilalih 4. Tingkat Kesehatan Bank 5. Issue-Issue Kritis 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

1. Menekan Peningkatan Kredit Bermasalah dan Penyaluran Kredit Baru dengan cara :
 - a. Mengoptimalkan upaya penagihan kepada debitur-debitur yang menunggak kewajiban.
 - b. Meningkatkan portofolio kredit baru.
 - c. Lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam proses pemberian kredit baru.
 - d. Melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi bisnis, seperti asosiasi property, asosiasi pedagang eceran, komunitas bisnis.
 - e. Tetap menyalurkan kredit baru di Fintech dengan prudent.
 - f. Melakukan restrukturisasi/ relaxasi kredit- kredit debitur yang terkena dampak pandemi covid-19, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Mempercepat penjualan barang jaminan debitur.
2. Efisiensi disegala lini untuk membentahankan agar bank tidak membukukan laba negatif.
3. Rekrutmen tegana kerja di bagian bisnis guna mendukung penambahan portofolio kredit.
4. Pemasaran dan kerja sama dengan badan lelang untuk menjual AYDA agar tidak mengurangi KPMM.
5. Melakukan Stress Test untuk mengitung kekuatan KPMM secara berkala oleh Direksi.
6. Direksi harus menindaklanjuti hasil temuan OJK yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan

- 2023.
7. Mencari solusi yang tepat terhadap nasabah yang melampaui BMPK dan direalisasikan dengan cepat
 8. Tetap menjaga komponen likuiditas dengan baik.
 9. Menindaklanjuti temuan Audit intern untuk meminimalisasi kekurangan data secara administratif.
 10. Mengupayakan agar Penerapan Tata Kelola, APU PPT PPPSPM dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	I Wayan Cenik	4	0	100%
2.	Fadlyn Yudhana	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat selama 4 Kali dalam 1 tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2023 tidak terdapat Penyimpangan Internal yang terindikasi fraud.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Terdapat 1 gugatan Perdata nasabah kredit yaitu dengan rincian proses sebagai berikut : 1. Pengadilan Negeri Tabanan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	07 Maret 2023	Sosial	Biaya sumbangan pembuatan ogoh-ogoh ST. Candra Werdhi Kencana. Br. Tegehe, Batubulan, Gianyar	ST. Candra Werdhi Kencana	Rp200.000
2.	22 Juni 2023	Sosial	Biaya pembelian kupon bazaar ST. Candra Werdhi Kencana. Br. Tegehe, Batubulan, Gianyar	ST. Candra Werdhi Kencana	Rp250.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tahun 2023 terdapat 2 pemberian dana Sosial dan tidak ada Sumbangan Kegiatan Politik.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR NAGA
Alamat	: JL. Raya Batubulan No. 36N, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar
Nomor Telepon	: (0361) 8401000
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp9.147.945.402
Total Aset	: Rp143.928.396.183

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR NAGA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.47	0.294
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.52	0.228
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.93	0.193
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.23	0.223
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.60	0.040
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.78	0.178
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.40	0.105
10	Rencana Bisnis BPR	1.37	0.103
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.55	0.116
Nilai Komposit			1.600
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.47)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Naga 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Secara umum Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Lainnya serta perlu terus dilakukan penyempurnaan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.52)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Naga 2 orang. Seluruh Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu dilakukan penyempurnaan pengawasan dalam fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum membentuk komite (Tidak Menerapkan Komite).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Selama tahun 2023 Tidak terdapat benturan kepentingan. Ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan sudah diterbitkan oleh BPR Naga dalam surat keputusan direksi no 012/SK.DIR/NAGA/OPS.06/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.93)

PT. BPR Naga sudah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR. Penerapan fungsi kepatuhan sebagian besar sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.23)

PE Audit Intern di PT. BPR Naga telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Manajemen dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (Otoritas Jasa Keuangan). Yang disampaikan setiap bulan januari untuk tahun berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2023 posisi audit internal masih kosong dan perlu dilakukan pemenuhan formasi sesuai dengan ketentuan otoritas.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)

Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen sesuai dengan ketentuan dari regulator.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.78)

PT. BPR Naga sudah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan sudah melakukan penilaian penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal. Laporan Profl Risiko sudah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.4)

PT. BPR Naga sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penerapan BMPK dan sudah melaksanakannya secara disiplin. Dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK. Selama tahun 2023 pernah terjadi pelampauan BMPK akibat penurunan rasio KPMM, namun sudah bisa diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2023. BPR Naga tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.37)

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Naga sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan. Secara umum pencapaian RBB tahun 2023 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan, tetapi pada pos Laba rugi belum tercapai, dimana pada tahun 2023 bank membukukan laba negatif karena adanya faktor eksternal pemulihan dari dampak pandemi COVID 19.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.55)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Naga telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT. BPR Naga juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Selama tahun 2023 usaha bank cenderung mengalami peningkatan volume cukup signifikan. Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional Bank masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang masih kurang guna mendukung peningkatan usaha Bank dan penguatan permodalan bank.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR Naga senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tata kelola dari Direksi dan Dewan Komisaris serta kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar semakin selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan walaupun dengan kinerja yang tidak cukup baik namun masih bisa bertahan dengan ditunjukkanya

Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengantisipasi potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Hasil Tata Kelola BPR Naga perlu menyelaraskan antara kegiatan bisnis bank dengan tata kelola yang baik untuk semakin meningkatkan kualitas hasil bisnis operasional bank dengan tetap berpedoman pada tata kelola sesuai dengan ketentuan agar bank tetap mampu tumbuh dan sehat sesuai nilai TKS.

Gianyar, 25 Januari 2024

PT. BPR NAGA



I Wayan Budi Artana, SE
Direktur Utama

Disetujui



BPR NAGA
PT. Bank Perseksionan Rakyat
Komitmen Terpercaya



I Wayan Cenic, SE
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Naga

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666212-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601830-25012024085809

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprnaga@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 08:58:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Gianyar, 25 Januari 2024

No : 020/NAGA/DIR/I/2024

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Kepada :

Yth. Kantor DPP Perbarindo dan Media BPR
Komp. Patra II NO. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naga Tahun 2023**

Dengan Hormat,

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 serta SEOJK NO. 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naga Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga
Direksi



BPR NAGA

I Wayan Budi Artana, SE
Direktur Utama

Tembusan :

1. Arsip